

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kota Kupang adalah sebuah kota madya dan sekaligus ibu kota provinsi Nusa Tenggara Timur. Kota madya merupakan sebuah wilayah yang dikepalai oleh seorang walikota. Sejak diberlakukannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, sebutan kota madya secara resmi diganti dengan Kota. Kota Kupang merupakan kota terbesar di Pulau Timor yang terletak di pesisir Teluk Kupang, bagian barat laut pulau Timor. Sebagai kota terbesar di provinsi Nusa Tenggara Timur, Kota Kupang dipenuhi oleh berbagai suku bangsa. Suku yang signifikan jumlahnya di kota kupang adalah suku Timor, Rote, Sabu, Tionghoa, Flores dan sebagian kecil pendatang dari Bugis dan Jawa. Adapun luas wilayah Kota Kupang adalah 180,27 km² dengan jumlah penduduk sekitar 450.360 jiwa (2014). Daerah ini terbagi menjadi 6 kecamatan dan 51 kelurahan.

Dewasa ini, pemerintah selalu menekankan pentingnya penerapan pengendalian internal di seluruh jajaran pemerintahan mulai dari pemerintah pusat sampai pemerintah daerah. Pengendalian internal merupakan salah satu kunci utama sebuah organisasi untuk mencapai tujuannya, baik itu organisasi swasta maupun organisasi pemerintahan. Pengendalian internal yang baik dapat mengurangi resiko kecurangan dalam organisasi pemerintahan sehingga secara langsung dapat meningkatkan kinerja organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pengendalian internal dapat mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang baik, bersih, dan berwibawa atau dikenal dengan istilah *good governance*. Sebagai salah satu organisasi pemerintahan di daerah, Kota Kupang juga mempunyai kewajiban untuk melaksanakan pengendalian internal agar pencapaian *good governance* dapat terwujud di wilayah Pemerintahan Kota Kupang.

Sistem pengendalian intern sendiri merupakan suatu perencanaan yang meliputi struktur organisasi dan semua metode dan alat-alat yang dikoordinasikan yang digunakan di dalam perusahaan atau instansi dengan tujuan untuk menjaga keamanan harta milik perusahaan atau instansi, memeriksa ketelitian dan kebenaran data akuntansi, mendorong efisiensi, dan membantu mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen yang telah ditetapkan. Dilihat dari tujuan tersebut maka sistem pengendalian internal dibagi menjadi dua yaitu pengendalian intern akuntansi (*Preventive Control*) dan pengendalian intern administratif (*feedback controls*). Adapun Pengendalian Intern Akuntansi dibuat untuk mencegah terjadinya inefisiensi yang tujuannya adalah menjaga kekayaan perusahaan dan memeriksa keakrutan data akuntansi. Contohnya: adanya pemisahan fungsi dan tanggung jawab antar unit organisasi. Sedangkan pengendalian administratif dibuat untuk mendorong dilakukannya efisiensi dan mendorongnya dipatuhinya kebijakan manajemen (dikerjakan setelah adanya pengendalian akuntansi). Contoh: pemeriksaan laporan untuk mencari penyimpangan yang ada, untuk kemudian diambil tindakan.

Adapun peran penting dari sistem pengendalian intern yaitu untuk membantu manajemen dalam mengendalikan dan memastikan keberhasilan dari kegiatan organisasi, menciptakan pengawasan melekat, menutupi kelemahan dan keterbatasan personel, serta mengurangi kemungkinan terjadinya kesalahan dan kecurangan. Membantu auditor dalam menentukan ukuran sampel dan pendekatan audit yang akan diterapkan, membantu auditor dalam memastikan efektifitas dan audit dengan keterbatasan waktu dan biaya audit. Sedangkan arti pentingnya sistem pengendalian intern bagi manajemen dan auditor independen sudah lama diakui dalam profesi akuntansi, dan pengakuan tersebut makin meluas dengan alasan sebagai berikut: Semakin luas lingkup dan ukuran perusahaan mengakibatkan di dalam banyak hal manajemen tidak dapat melakukan pengendalian secara langsung atau secara pribadi terhadap jalannya perusahaan atau organisasi, pengecekan dan tinjauan yang melekat pada sistem pengendalian intern yang baik dapat pula melindungi dari kelemahan manusia dan mengurangi kekeliruan dan penyimpangan yang akan terjadi. Serta di lain pihak adalah tidak

praktis bagi auditor untuk melakukan pengauditan secara menyeluruh atau secara detail untuk hampir semua transaksi perusahaan dalam waktu dan biaya terbatas.

Bagi Pemerintah Daerah, pengendalian internal yang wajib diterapkan dan dijadikan acuan adalah Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian intern pemerintah atau lebih dikenal dengan SPIP. Dimana sistem pengendalian intern menurut peraturan ini adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Audit pada organisasi sektor publik juga telah menjadi isu yang sangat penting dalam rangka mewujudkan *good governance*. Auditing merupakan suatu investigasi independen terhadap beberapa aktivitas khusus. Mekanisme audit merupakan sebuah mekanisme yang dapat menggerakkan makna akuntabilitas di dalam pengelolaan sektor pemerintahan, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau instansi pengelola aset negara lainnya. Auditing didefinisikan sebagai proses pengumpulan dan pengevaluasian bahan bukti tentang informasi yang dapat diukur mengenai suatu entitas ekonomi yang dilakukan seorang yang kompeten dan independen untuk dapat menemtukan dan melaporkan kesesuaian informasi dimaksud dengan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan (Arens & Loebbecke, 2002). Sedangkan audit pada organisasi sektor publik didefinisikan sebagai suatu proses sistematis secara objektif untuk melakukan pengujian keakuratan dan kelengkapan informasi yang disajikan dalam suatu laporan keuangan organisasi sektor publik.

Dengan adanya sistem pengendalian intern dan internal control yang baik maka tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dapat terwujud dalam mencapai pelaksanaan program-program pemerintah yang telah direncanakan sebelumnya. *Good governance* yang efektif menuntut adanya koordinasi yang baik dan integritas, professional sertas etos kerja dan moral yang tinggi. Dengan demikian penerapan konsep “*good governance*” dalam

penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan merupakan tantangan tersendiri. Untuk terselenggaranya *good governance* merupakan persyaratan utama untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan dan cita-cita bangsa dan negara. Dalam rangka hal tersebut, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari KKN.

Berdasarkan penjelasan diatas maka peneliti tertarik untuk menganalisis bagaimana penerapan sistem pengendalian internal pemerintah yang baik di instansi Pemerintah Kota Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur. Maka untuk itulah alasan penulis melakukan penelitian dengan judul “ANALISA SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH PADA PEMERINTAH KOTA KUPANG, PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR”.

1.1. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah, rumusan permasalahan yang akan dijadikan pokok pembahasan dalam penelitian ini yaitu :

Apakah penerapan prosedur sistem pengendalian internal pemerintah (SPIP) pada instansi Pemerintah Kota Kupang sudah sesuai PP Nomor 60 Tahun 2008?

1.2. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah :

Untuk mengetahui apakah prosedur sistem pengendalian intern pada instansi pemerintah kota Kupang sudah sesuai PP Nomor 60 Tahun 2008 atau belum.

1.3. Manfaat Penelitian

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan memperkaya ilmu pengetahuan sebagai pengembangan ide atau gagasan dan argumentasi tentang hasil pengamatan yang disusun melalui karya ilmiah ini.

2. Bagi Instansi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran bagi instansi Pemerintah Kota Kupang khususnya pada Kantor Walikota Kupang untuk memperbaiki dan untuk mencapai pelayanan organisasi Pemerintahan Kota Kupang agar sesuai dengan SPIP Nomor 60 Tahun 2008 agar supaya cita-cita dan aspirasi masyarakat berjalan dengan baik untuk kemajuan pembangunan di Kota Kupang kearah yang lebih baik kedepannya.

3. Bagi akademik

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan pengembangan ilmu pengetahuan dan berguna juga untuk referensi bagi mahasiswa yang akan datang.

1.4. Batasan Masalah

Berdasarkan pada rumusan permasalahan tersebut diatas, maka peneliti membatasi masalah, tujuan adanya pembatasan masalah agar pembahasan lebih terfokus. Penelitian ini dibatasi pada sistem pengendalian intern pemerintah.

1.5. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini merujuk pada pedoman penulisan skripsi yang dikeluarkan oleh Universitas Bhayangkara Jakarta Raya untuk memberikan gambaran yang jelas dari penelitian yang dilakukan oleh penulis. Adapun sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini mengenai tentang latar belakang masalah terkait sistem pengendalian intern pemerintah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini mengenai tentang teori yang relevan dengan masalah yang diteliti, yaitu landasan teori, pengendalian internal, fungsi pengendalian intern, audi internal, definisi audit internal menurut para ahli, tujuan audit internal, fungsi audit internal, ruang lingkup audit internal, perbedaan audit internal dan eksternal,

akuntansi sektor publik, definisi akuntansi sektor publik, ruang lingkup akuntansi sektor publik, elemen-elemen akuntansi sektor publik, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), tujuan SPIP, unsur-unsur pengendalian intern pemerintah, dan penelitian terdahulu.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini mengenai tentang desain penelitian, tahapan penelitian, model konseptual penelitian, waktu dan tempat penelitian, metode pengumpulan data, dan metode analisis data.

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bab ini mengenai tentang gambaran umum Kota Kupang, sejarah Kota Kupang, visi dan misi, struktur organisasi pemerintah Kota Kupang, hasil analisis data, SPIP pada inspektorat Kota Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur, lingkungan pengendalian, penilaian resiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, pemantauan pengendalian intern, pembahasan hasil penelitian, faktor pendukung dan penghambat SPIP di Inspektorat Kota Kupang, peran SPIP dalam mewujudkan efisiensi dan efektivitas operasional dan kepatuhan.

BAB V PENUTUP

Bab ini mengenai tentang kesimpulan dan implikasi manajerial.